



## Efisiensi Digitalisasi Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Surabaya

Wina Juliana<sup>1</sup>, Singgih Manggalou<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author : [22041010088@student.upnjatim.ac.id](mailto:22041010088@student.upnjatim.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received November 17, 2024

Revised December 15, 2024

Accepted December 26, 2024

Available online January 22, 2025

#### Kata Kunci:

*e-procurement*; efisiensi; pengadaan barang dan jasa

#### Keywords:

*e-procurement*; efficiency; procurement of goods and services



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

### ABSTRAK

Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan *e-procurement* dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa (lelang). *E-procurement* ini adalah inovasi dari pengadaan barang dan jasa secara konvensional ke pengadaan barang dan jasa berbasis digital. Diharapkan dengan penerapan *e-procurement* ini, pemerintah Kota Surabaya akan dapat membangun pemerintahan yang efisien, efektif, jelas, dan akuntabel. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menemukan dan mempelajari bagaimana pemerintah Kota Surabaya dapat lebih efisien memberikan akses yang lebih luas kepada penyedia barang dan jasa. Sistem ini juga membantu mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan.

### ABSTRACT

The Surabaya City Government has implemented *e-procurement* in the procurement of goods and services (auction). This *e-procurement* is an innovation from conventional procurement of goods and services to digital-based procurement of goods and services. It is hoped that with the implementation of this *e-procurement*, the Surabaya City government will be able to build an efficient, effective, clear, and accountable government.

The purpose of this journal is to find and study how the Surabaya City government can more efficiently provide wider access to providers of goods and services. This system also helps reduce corrupt practices and increase public trust in the procurement process.

## 1. PENDAHULUAN

Digitalisasi telah mendorong perubahan besar dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, bisnis, dan pendidikan, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Digitalisasi mempercepat dan mengakuratkan proses, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan mengurangi kemungkinan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan hal ini, penggunaan teknologi digital mempercepat inovasi dan menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di era revolusi industry 4.0, sektor konstruksi di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang semakin rumit. Untuk menghadapi dinamika tersebut, digitalisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing konstruksi. (Rizky Hutama Putra Haqq et al., 2024)

Namun, meskipun digitalisasi menawarkan berbagai manfaat, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan keterampilan teknologi di kalangan pengguna, baik dari pihak penyedia maupun pengelola pengadaan. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata juga dapat menghambat aksesibilitas. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi tingkat efisiensi yang dicapai melalui digitalisasi lelang pengadaan barang dan jasa di Kota Surabaya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan proses tersebut.

Salah satu cara *e-government* untuk mencapai pemerintahan yang baik di Indonesia adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital, atau *e-procurement*. Dalam operasinya, pemerintah Kota Surabaya menggunakan *e-procurement*, yang merupakan evolusi dari pembelian konvensional. Menurut Sutedi (2012), *e-procurement* adalah sistem lelang untuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang menggunakan internet, teknologi, informasi, dan komunikasi untuk membuat prosesnya efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel. Penjelasan yang diberikan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah proses pembelian barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, atau institusi lainnya, yang dimulai dengan perencanaan kebutuhan dan berakhir dengan pelaksanaan kegiatan. (Yuwinanto, 2013)

Sistem pengadaan barang dan jasa secara digital (*e-procurement*) telah menjadi praktik yang membudaya di berbagai negara maju, di mana penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan telah terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Indonesia, sebagai negara yang terus berupaya memperbaiki sistem pengadaannya, sangat membutuhkan penerapan sistem *e-procurement* untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai hal ini, dukungan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting, agar pemerintah dapat melakukan penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, sistem ini diharapkan dapat memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang seringkali menghambat proses pengadaan. (Kurniawan & Qomaruddin, 2021)

Pemerintah Kota Surabaya melakukan inovasi dalam pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital, atau *e-procurement*, untuk mencapai tujuan umum penggunaan *e-procurement*: meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas serta akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui media digital antara pengguna dan penyedia jasa. Diharapkan implementasi *e-procurement* di Kota Surabaya memberikan manfaat, seperti mengurangi biaya dan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan. Selain itu, dianggap bahwa *e-procurement* dapat "membebaskan" proses pengadaan barang dan jasa dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ini akan memungkinkan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang memenuhi prinsip Good Governance dan dijadikan inisiatif pilot di seluruh Indonesia. (L. Diah Astari, M. Dalatululum, 2020)

Penjelasan dari salah satu pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan menyebutkan bahwa pernah mengalami kendala atau permasalahan saat menangani masyarakat yang ingin mengakses aplikasi *e-procurement*, contohnya yaitu terdapat pada kendala proses komunikasi, dan penyedia

barang/jasa (*vendor*) yang belum sepenuhnya memahami aplikasi *e-procurement*, sehingga mereka kesulitan dalam memanfaatkan platform tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. Namun kendala ini sudah diatasi dan diminimalisir dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sudah dikembangkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan dengan selalu memberikan informasi terbaru dan tata cara untuk mengakses platform tersebut yang sudah dibagikan melalui Instagram Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan serta menerima layanan konsultasi langsung mengenai kendala yang dihadapi oleh penyedia barang/jasa (*vendor*). Menurut peneliti hal ini sangat membantu dan menambahkan wawasan untuk para Masyarakat Kota Surabaya dalam mengetahui layanan mengenai pengadaan lelang secara digital (*e-procurement*) di Kota Surabaya.

Pada pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, "pengadaan secara digital" didefinisikan sebagai Pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sangat penting dalam konteks pengadaan pemerintah. Definisi ini menggambarkan peran krusial teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan aspek fundamental dalam setiap proses pengadaan. Dengan penerapan sistem *e-procurement*, Kota Surabaya telah berhasil mengurangi tingkat korupsi yang sering kali menjadi masalah dalam pengadaan barang dan jasa publik. Lebih jauh lagi, dampak positif dari sistem pengadaan digital ini terlihat dari meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya. Meskipun baru memasuki bulan kedua pada tahun 2014, data dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang dilansir oleh harian Jawa Pos pada 7 Februari 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 142 paket pembangunan telah berhasil dikirim. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aktivitas pembangunan, yang tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memastikan bahwa setiap proyek dapat dilaksanakan dengan lebih transparan dan akuntabel. (Novitaningrum, 2014)

Kota Surabaya telah menjadi kota percontohan pelaksanaan *e-procurement* semenjak fenomena kejadian tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Surabaya mengalami penurunan masalah KKN yang hasilnya sangat membuat Pemerintah Kota Surabaya menjadi lebih akuntabel dan juga efisien dalam penerapan sistem *e-procurement*.

**Tabel 1. Penerapan E-procurement di Kota Surabaya**

No.	Tahun	Penerapan E-procurement
1	2004	<i>E-procurement</i> awal mula diterapkan di Kota Surabaya, mulai diperkenalkan sebagai bagian dari upaya modernisasi pengadaan barang dan jasa.
2	2008	- Pengembangan sistem yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan <i>e-procurement</i> secara lebih formal dengan berdirinya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

		- Kota Surabaya menjadi salah satu pelopor dalam penerapan sistem lelang digital di Indonesia
3	2009 - 2013	Meraih pencapaian peningkatan efisiensi anggaran hingga 10% atas inovasi dan keberhasilan sistem <i>e-procurement</i> sejak diimplementasikannya.
4	2014 - sekarang	Modernisasi dan inovasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Penjelasan menurut Mulyamah (1987:3) efisiensi merupakan suatu ukuran penggunaan input yang dibandingkan serta yang direncanakan dan direalisasikan, atau penggunaan aktual. Menurut Usman (2011) dalam Claudy DKK yaitu suatu proses penghematan 7M+1H melalui pekerjaan yang benar (*do things right*). 7M+1H yang dimaksud yaitu meliputi *man, money, material, machines, methods, marketing, and minutes+information*. Dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwa efisiensi berarti meminimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang optimal. (Diah Astari et al., 2020).

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, baik dari wawancara langsung dengan pihak Perusahaan. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berada pada lokasi di wilayah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surabaya khususnya pada bidang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Administrasi Pembangunan. *E-procurement* dapat disebut efisien jika dapat memenuhi beberapa kriteria prinsip efisiensi yang telah disebutkan dalam teori Usman (2011), bahwa efisiensi dalam penerapan *e-procurement* di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Man*, yaitu dengan kata lain berkaitan dengan sejauh mana sumber daya manusia digunakan berdasarkan keterampilan dan kemampuannya dalam pemanfaatan teknologi informasi.
2. *Money*, yaitu dana yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa harus dikelola dengan cermat. Untuk mencapai efisiensi dan penghematan yang optimal, penggunaan dana tersebut harus diminimalkan.
3. *Material*, yaitu pengurangan penggunaan bahan untuk kegiatan administrasi, terutama dalam bentuk pemakaian kertas yang berlebihan, menjadi langkah penting dalam upaya efisiensi sumber daya
4. *Machines*, yaitu suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien apabila mampu memanfaatkan mesin atau teknologi informasi semaksimal mungkin.
5. *Methods*, yaitu penggunaan metode yang lebih sederhana dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Surabaya telah membawa perubahan

signifikan. Awalnya, kegiatan pengadaan dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan tatap muka langsung dan mengikuti prosedur yang panjang, sehingga sangat memakan waktu dan tenaga.

6. *Marketing*, yaitu pasar yang terbuka ini memberikan kesempatan bagi penyedia kecil dan menengah untuk bersaing secara adil dengan perusahaan besar, meningkatkan keberagaman pilihan bagi pemerintah dan instansi lain dalam memilih penyedia.
7. *Minutes Information*, Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat melalui penerapan *e-procurement*. Dengan sistem ini, Pemerintah Kota Surabaya memiliki kemampuan untuk menyebarkan seluruh informasi terkait pengadaan barang dan jasa dengan cara yang lebih efisien dan efektif. (Diah Astari et al., 2020)

Untuk mendapatkan data ini, peneliti menggunakan kedua data primer dan sekunder. Dalam data primer, peneliti mewawancarai staf dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya, termasuk Mas Naufal dari bagian *e-procurement*. Dalam data sekunder, peneliti melakukan penelitian terdahulu tentang program *e-procurement* di Kota Surabaya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seiring Kebijakan publik dibuat dalam kerangka "untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan." Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teoritis, tetapi juga mencerminkan tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Dalam situasi ini, kebijakan publik terkait dengan tindakan pemerintah saat ini, bukan hanya keinginan mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya membuat kebijakan yang efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Widodo (2011: 14), kebijakan publik harus dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan dampaknya di lapangan. Oleh karena itu, proses pembuatan kebijakan harus melibatkan analisis mendalam terhadap masalah yang ada, serta pemahaman yang baik tentang tujuan yang ingin dicapai. Dalam implementasinya, kebijakan publik seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. (Claudy et al., 2015)

Pembaharuan aturan dan teknis pengadaan tidak mengubah prinsip dasar yang mendasari proses pengadaan, di mana salah satu fokus utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap langkah yang diambil. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia mulai mengusulkan penerapan sistem pengadaan berbasis digital sebagai langkah maju dalam reformasi pengadaan. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap kemajuan teknologi yang semakin pesat, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem digitalisasi, proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi kemungkinan kesalahan yang sering terjadi dalam metode konvensional. Peraturan ini membentuk dasar hukum digital untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses

pengadaan. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah salah satu dari banyak perubahan aturan ini.

Selama kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya, penerapan *e-procurement* mengalami berbagai tantangan dan keberhasilan yang signifikan. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai implementasi *e-procurement* di Kota Surabaya selama masa jabatannya:

1. Awal penerapan: *E-procurement* di Kota Surabaya dimulai pada tahun 2002 ketika Risma menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Pembangunan. Pada awalnya, program ini menghadapi penolakan dan ancaman, termasuk ancaman fisik terhadap Risma. Namun, dengan dukungan dari ahli teknologi informasi, Profesor Richardus Eko Indrajit, program ini berhasil diterapkan untuk memutus rantai korupsi.
2. Tujuan dan Manfaat: Tujuan utama dari penerapan *e-procurement* adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan sistem ini, Pemkot Surabaya dapat mempercepat proses pembangunan, menghemat biaya pengadaan hingga 20-25%, dan memanfaatkan penghematan tersebut untuk proyek pembangunan infrastruktur.
3. Inovasi Berkelanjutan: Setelah sukses dengan *e-procurement*, Bu Risma terus mengembangkan aplikasi lain seperti *e-budgeting* dan *e-musrenbang* untuk meningkatkan manajemen keuangan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan. Penerapan sistem ini juga menjadikan Surabaya sebagai model *e-government* nasional.
4. Pengaruh Positif: Keberhasilan penerapan *e-procurement* di Surabaya menarik perhatian banyak daerah lain yang datang untuk belajar dari pengalaman Surabaya dalam menerapkan teknologi informasi dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan tidak hanya berdampak positif bagi Surabaya tetapi juga memberikan inspirasi bagi daerah lain.
5. Pengawasan dan Akuntabilitas: *E-procurement* memungkinkan Pemkot Surabaya untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Sistem ini mencakup fitur untuk memantau jadwal lelang, kontrak kinerja, serta blacklist bagi kontraktor yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, penerapan *e-procurement* di Kota Surabaya selama masa kepemimpinan Bu Risma tidak hanya berhasil mengatasi tantangan awal tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Penerapan *e-procurement* di Kota Surabaya sudah sangat membantu para masyarakat untuk melakukan lelang barang dan jasa. Dengan penerapan *e-procurement* ini, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan di Kota Surabaya mempunyai data sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Surabaya melalui LPSE**

Tahun	Tender	Non Tender
2020	277	38
2021	447	172
2022	405	478
2023	386	537
2024	390	516

Sumber: Data diolah oleh peneliti

mengenai penerapan *e-procurement* di Kota Surabaya yang menunjukkan bahwa sistem ini telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan yang dilakukan secara elektronik dengan beberapa jenis pengadaan, antara lain yaitu jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, serta jasa yang lainnya selama lima tahun terakhir yang dapat dilihat melalui website LPSE Kota Surabaya.

Efisiensi digitalisasi lelang pengadaan barang dan jasa di Kota Surabaya (*e-procurement*) diukur berdasarkan prinsip penerapan efisiensi menurut Usman (2011) yang terdapat beberapa prinsip efisiensi yang perlu diperhatikan dalam penerapan *e-procurement*, diantaranya:

#### 1. *Man* (Sumber Daya Manusia)

Pemanfaatan sumber daya manusia berbasis keterampilan dan kompetensi teknologi informasi merupakan elemen kunci efektivitas sistem *e-procurement*. Mokamad Jasin dkk. (2007: 22-23) dalam bukunya "Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement: Tinjauan Keberhasilan Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya" menemukan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pengurangan anggaran pegawai yang berkaitan dengan tabungan. Ia menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa dapat dikelola. Penghematan ini dicapai dengan melibatkan karyawan yang memiliki keahlian teknologi informasi sehingga proses pengadaan dapat berjalan lebih efisien. Dengan melibatkan sumber daya manusia yang terampil pada teknologi informasi, Pemerintah Kota Surabaya bisa memaksimalkan fungsi sistem *e-procurement*. Pemerintah Kota Surabaya Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan memiliki pegawai yang terlatih dan kompeten dalam menjalankan tugas dan bagiannya mereka, hal ini dibuktikan dengan adanya monitoring evaluasi yang diadakan setiap bulan oleh seluruh pegawai

#### 2. *Money* (Anggaran)

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengadaan barang atau jasa sangat krusial dalam memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, dalam penggunaan anggaran tersebut, berbagai strategi diterapkan untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat mencapai penghematan yang signifikan. Berdasarkan laporan yang dilansir oleh Kompas.com, Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dalam penerapan sistem *e-procurement*, di mana mereka berhasil menghemat anggaran hingga 400 miliar rupiah. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam

proses pengadaan, tetapi juga menunjukkan dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan memanfaatkan sistem *e-procurement*, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terstruktur dan terpantau, sehingga mengurangi potensi pemborosan dan meningkatkan nilai untuk uang (*value for money*) bagi Masyarakat. Ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-procurement* di Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk menurunkan biaya dan meningkatkan layanan publik serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu, sistem *e-procurement* menjadi alat penting untuk mendukung pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

### **3. Material (Bahan)**

Peralihan metode konvensional yang bergantung pada dokumen fisik, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengurangi penggunaan kertas secara signifikan. Penggunaan sistem digital tidak hanya mempercepat proses pengadaan tetapi juga mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh limbah kertas. Selain itu, efisiensi ini juga berdampak pada pengurangan biaya operasional terkait pencetakan dan penyimpanan dokumen. Pengurangan penggunaan bahan-bahan untuk kegiatan administrasi, terutama dalam bentuk pemakaian kertas yang berlebih, menjadi salah satu fokus utama dalam upaya efisiensi di era digital. Penerapan *e-procurement* memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya khususnya Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan dalam mengimplementasikan *e-procurement* juga menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan publik. Dengan langkah ini, diharapkan tidak hanya penghematan biaya dan sumber daya yang tercapai, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Ini adalah contoh nyata bagaimana inovasi teknologi dapat mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.

### **4. Machines (Mesin)**

Penerapan sistem *e-procurement* di Surabaya tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang sering kali lambat dan rentan terhadap kesalahan. Dengan menggunakan platform digital, semua tahapan pengadaan dapat dilakukan secara online, mulai dari pengumuman lelang hingga evaluasi penawaran. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola data dengan lebih baik dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan integrasi berbagai sistem yang mendukung dan menciptakan pengawasan dan akuntabel.

Dengan adanya fitur pelaporan dan pemantauan secara real-time yang diterapkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, lelang pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online melalui aplikasi pusat dan aplikasi internal, pihak berwenang dapat dengan mudah memantau setiap langkah dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga efisiensi waktu, koordinasi sangat maksimal, dan pencapaian hasil kerja dapat dikatakan memenuhi efisiensi, dan juga potensi hal-hal yang menyimpang dapat dihindari.

### **5. Methods (Metode)**

Penggunaan metode yang lebih sederhana dalam proses pengadaan barang dan jasa telah menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan efisiensi administrasi. Awalnya, kegiatan pengadaan di Kota Surabaya dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan tatap muka langsung dan melalui prosedur yang panjang, sehingga sangat memakan waktu. Namun, setelah Pemerintah Kota Surabaya menerapkan aplikasi *e-procurement*, metode yang digunakan menjadi jauh lebih efisien dari segi waktu karena tidak lagi memerlukan pertemuan fisik.

Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan semua pihak untuk berinteraksi secara lebih efektif tanpa harus bertatap muka langsung. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat pengambilan keputusan. Dengan demikian, penerapan *e-procurement* tidak hanya memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

#### **6. Marketing (Promosi)**

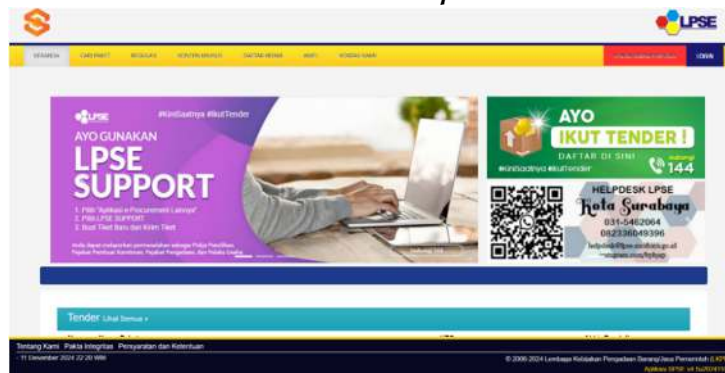
Adanya marketing dengan pengadaan secara digital dan berbasis online, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, tetapi juga mampu menunjang pasar yang lebih luas. Dengan marketing yang luas, hal ini membuat para *vendor*/penyedia barang dan jasa dapat berkontribusi dan dapat menghasilkan penawaran harga yang lebih baik dan kualitas barang atau jasa yang lebih tinggi bagi pemerintah. Dengan demikian, sistem pengadaan digital tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dalam hal efisiensi biaya dan waktu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan kesempatan kepada lebih banyak pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan. Dalam website *e-procurement* (<https://lpse.surabaya.go.id/eproc4/>) terdapat halaman yang membantu para *vendor* ataupun para pendaftar yang ingin berkontribusi dalam proses pengadaan barang/jasa. Secara keseluruhan, penerapan pasar pengadaan secara digital merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan dinamis. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah dan sektor swasta yang dapat mendorong inovasi serta meningkatkan daya saing nasional di era globalisasi ini.

#### **7. Minutes informations (Informasi Detail)**

Sistem pengadaan barang dan jasa digital Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, tetapi juga mampu menunjang pasar yang lebih luas. Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan memanfaatkan dengan membuat informasi melalui website LPSE yang dapat diakses untuk Masyarakat umum di Kota Surabaya (<https://lpse.surabaya.go.id/eproc4/>). Website ini dirancang untuk dapat diakses oleh masyarakat umum di Kota Surabaya, sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi calon penyedia untuk mengetahui peluang pengadaan yang tersedia. Selain itu, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan di Kota Surabaya juga memberikan informasi melalui instagram @bpbjap dengan memberikan informasi mengenai tata cara pendaftaran *vendor*, mengikuti tender, layanan bantuan, dan sebagainya. Hal ini tentunya dapat menyebarkan informasi lebih cepat dan mudah. Melalui *e-*

procurement, Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengadaan barang dan jasa secara cepat dan mudah.

Gambar 1. Website E-procurement



Sumber: Dokumen penelitian

Gambar 2. Feeds Instagram BPBJAP



Sumber: Dokumen Peneliti

Dengan adanya informasi yang transparan dan mudah diakses, penyedia barang dan jasa, termasuk usaha kecil dan menengah, dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses pengadaan. Hal ini tidak hanya mendorong kompetisi yang lebih sehat, tetapi juga meningkatkan kualitas penawaran yang diterima oleh pemerintah. Selain itu, sistem ini berkontribusi pada upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih akuntabel dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan dapat terjaga. Dengan demikian, digitalisasi dalam pengadaan tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kota Surabaya.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Berdasarkan penyajian pada hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa digitalisasi lelang barang dan jasa secara digital dapat mewujudkan efisiensi dalam pemerintahan dengan menerapkan salah satu pelayanan digital berupa aplikasi yang inovatif, transparansi, dan akuntabel yang disebut *e-procurement*. Dengan aplikasi *e-procurement*, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan di Kota Surabaya dapat dengan mudah melakukan

proses lelang pengadaan barang dan jasa secara terstruktur dan menghemat waktu serta biaya. Dapat dilihat pada tabel progress penerapan *e-procurement* dari tahun ke tahun yang menghasilkan peningkatan dalam implementasinya baik tender maupun non tender. Dengan demikian, penerapan Hal ini tentu saja dapat terus mensejahterakan Kota Surabaya dalam pengadaan lelang barang dan jasa, serta dapat memudahkan masyarakat dengan kebutuhan yang melalui aplikasi *e-procurement*. Hal ini dapat dilihat dari prinsip efisiensi yang meliputi *Man, Money, Machine, Methode, Marketing, Minutes Information* yang dapat membangun dan mengantisipasi kendala serta tantangan dalam pelaksanaan aplikasi *e-procurement* di Kota Surabaya serta dapat menjadi contoh/dukungan terhadap daerah-daerah di Indonesia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Claudy, F., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2015). Efisiensi Sistem E-Procurement dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa. *Citizen Charter*, 1(1), 1-6.
- Diah Astari, L., Dalatululum, M., Kurniasih, N., Devi Indahsari, N., & Kurniasih, Y. (2020). ANALISIS PENERAPAN E-PROCUREMENT SEBAGAI EFISIENSI PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, Mei 2020, Vol. 4 No.(1).
- Edi Azwar. (2019). PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (MAGANG) TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI MAHASISWA PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI. *PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (MAGANG)TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI MAHASISWA PENDIDIKAN JASMANI KESEHATANDAN REKREASI*, 6(2), 211-221.
- Kurniawan, B., & Qomaruddin. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Digital Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Publika*, 3, 257-266.
- L. Diah Astari, M. Dalatululum, N. K. et al. (2020). ANALISIS PENERAPAN E-PROCUREMENT SEBAGAI EFISIENSI PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA. In *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* (Vol. 4, Issue 1).
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement ( Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya ). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 200-210. <http://www.index.ti.or.id/report/2010/11/09/>
- Rizky Hutama Putra Haqq, Ahmad Ferdiansyah Pratama Putra, Moch Raffli Trio Romadhoni, Muhammad Irvan Arizqullah, & Dika Ayu Safitri. (2024). Digitalisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan Jurnal Mekari Pada PT. Sarana Remaja Mandiri. *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 2(3), 157-166. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i3.869>
- Yuwinanto, H. P. (2013). Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jejaring Administrasi Publik*, 5(1), 212-231. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d52>
- Zuhri, S., & Sofia Ulfa Arrofi U. (2023). STRATEGI PENERAPAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA DIGITAL (E-PROCUREMENT) DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT. PERTAGAS NIAGA TAHUN 2018. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 80-90. <https://doi.org/10.33822/jpds.v2i2.5906>